

Jurnal Budget

Vol. 3, No. 2, 2018

ISSN 2541-5557

Pusat Kajian Anggaran

Badan Keahlian DPR RI

SUSUNAN DEWAN REDAKSI

JURNAL BUDGET

Penanggungjawab

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

Pemimpin Redaksi

Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM

Redaktur

Martha Carolina, S.E., Ak., M. Ak.

Rendy Alvaro, S.Sos

Ratna Christianingrum, S. Si., M.Si.

Editor

Ade Nurul Aida, S.E

Sekretariat

Husnul Latifah, S.Sos.

Memed Sobari

Musbiyatun

Jurnal ini diterbitkan oleh Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian DPR RI. Isi dan hasil penelitian dalam tulisan-tulisan di jurnal ini sepenuhnya tanggung jawab para penulis dan bukan merupakan pandangan resmi Badan Keahlian DPR RI.

Jurnal ini diterbitkan dua kali dalam setahun pada bulan Juni dan Desember berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai isu-isu keuangan negara terkini yang dapat menjadi dukungan substansi bagi pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan DPR RI.

Halaman ini sengaja dikosongkan

PENGANTAR REDAKSI

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Jurnal Ilmiah Jabatan Fungsional Analis APBN yang bernama "**Budget**" kembali terbit dan memasuki volume ketiga. Jurnal Budget Volume 3 Edisi 2 merupakan hasil dari proses redaksional dan penulisan yang dimulai dari awal tahun 2018 hingga terbit pada bulan November 2018.

Terbitan Jurnal Budget ini merupakan hasil kerja redaksi, para Analis APBN dari Pusat Kajian Anggaran, para Peneliti dari Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI sebagai penulis utama, dan tentunya pimpinan Pusat Kajian Anggaran BKD DPR RI beserta jajarannya. Redaksi tetap memberikan kesempatan bagi semua pihak yang berkepentingan untuk ikut memberikan masukan dan menentukan tata kelola yang terbaik serta ikut berkontribusi dalam jurnal **Budget** ini.

Jurnal **Budget** dalam setiap terbitan berisi materi yang membahas seputar permasalahan dalam keuangan negara yang merupakan lingkup tugas dari Jabatan Fungsional Analis APBN. Sebagai output yang diterbitkan di lingkungan parlemen, yaitu MPR/DPR/DPD RI maka diharapkan materi yang disajikan didalamnya, meskipun bersifat ilmiah dan pembahasan keilmuan/akademik, namun tetap mampu menjadi sumber informasi, memberikan kontribusi data-data hingga rekomendasi bagi tugas dan kewenangan anggota parlemen, khususnya Anggota DPR RI.

Meskipun telah mencapai volume ketiga, jurnal kami pastilah tak luput dari kekurangan. Untuk itu, selanjutnya Redaksi mengharapkan masukan terbuka dari semua pihak atau *stakeholders*, demi perbaikan dan peningkatan kualitas jurnal sebagaimana harapan kita semua.

Redaksi berharap semoga artikel-artikel ilmiah yang termuat dalam jurnal ini mampu memberikan manfaat bagi analis APBN, peneliti, anggota parlemen, maupun pihak-pihak akademisi dan profesional yang mempunyai minat dalam penelitian terkait isu-isu keuangan negara

Dewan Redaksi

Halaman ini sengaja dikosongkan

Jurnal Budget

Vol. 3, No. 2, 2018

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi	iv
Daftar Isi	vi
Pengaruh Impor Pangan Terhadap Kesejahteraan Petani Pangan <i>Martha Carolina dan Robby A. Sirait</i>	1
Dampak Subsidi Pupuk Terhadap Kesejahteraan Petani dan Daya Saing Komoditas Tanaman Pangan Padi Jagung Kedelai <i>Dahiri dan Adhi Prasetyo</i>	21
Pengaruh DAU, DBH dan Derajat Desentralisasi Terhadap Ruang Fiskal Pemerintah Kabupaten Daerah Tertinggal <i>Slamet Widodo dan Rastri Paramita</i>	41
Pengaruh Anggaran Pendidikan Terhadap Pembangunan Pendidikan Indonesia <i>Ratna Christianingrum</i>	63
Analisis Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial dan Hibah di Tingkat Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 <i>Dwi Resti Pratiwi dan Marihot Nasution</i>	99

Pengaruh Impor Pangan terhadap Kesejahteraan Petani Pangan

Martha Carolina dan Robby A. Sirait

Ringkasan

Impor tanaman pangan dapat menstabilkan harga beras dalam waktu relatif singkat dan memenuhi kebutuhan domestik. Namun dilain sisi impor tanaman pangan akan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan petani pangan. Bertambahnya jumlah impor pangan ke pasar domestik akan berdampak pada bertambahnya pasokan pangan di pasar domestik. Penambahan pasokan pangan tersebut akan berimplikasi pada penurunan harga, jika penambahan tersebut tidak diikuti oleh peningkatan permintaannya. Penurunan harga akibat kelebihan pasokan tersebut akan berdampak pada penurunan pendapatan yang diterima petani dan juga dapat menjadi disinsentif bagi petani untuk tetap memproduksi tanaman pangan atau bahkan untuk meningkatkan skala produksinya. Penurunan pendapatan ini pada akhirnya akan berdampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan petani pangan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mencoba mengidentifikasi apakah impor pangan memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan petani pangan yang diproksi dengan Nilai Tukar Petani Pangan (NTPP).

Penelitian ini menggunakan metode analisis statistik inferensial dengan metode estimasi *Feasible Generalized Least Square* (FLGS). Sedangkan sumber data penelitian ini adalah data sekunder berupa data *time series* bulanan, periode tahun 2011–2017. Hasil estimasi menunjukkan bahwa impor pangan berpengaruh negatif dan tidak signifikan secara statistik terhadap nilai tukar petani pangan (NTPP). Temuan ini menunjukkan bahwa impor pangan tidak berdampak terhadap penurunan tingkat kesejahteraan petani pangan. Tidak signifikannya pengaruh impor pangan terhadap NTPP tersebut menunjukkan bahwa jumlah impor tidak begitu signifikan menggerus nilai tukar petani. Dengan kata lain, jumlah impor pangan tidak begitu signifikan mengurangi pasokan pangan dari petani ke pasar domestik. Demikian juga dengan penurunan harga pangan domestik paska adanya impor pangan. Artinya, adanya impor pangan tidak serta merta secara signifikan menurunkan harga pangan domestik yang dapat berdampak pada penurunan tingkat kesejahteraan petani pangan.

Dampak Subsidi Pupuk Terhadap Kesejahteraan Petani Dan Daya Saing Komoditas Tanaman Pangan Padi Jagung Kedelai

Dahiri dan Adhi Prasetyo

Ringkasan

Demi terwujudnya peningkatan kesejahteraan petani dan meningkatkan daya saing komoditas tanaman pangan, pemerintah dalam setiap tahunnya selalu memberikan subsidi pupuk yang jumlahnya terus meningkat setiap tahunnya. Besarnya anggaran tersebut sangat diharapkan efektif meningkatkan kesejahteraan petani khususnya tanaman pangan. Namun harapan tersebut belum terealisasi karena kesejahteraan petani tanaman pangan dari tahun 2015-2017 cenderung mengalami penurunan. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dampak subsidi pupuk terhadap kesejahteraan petani tanaman pangan padi, jagung, kedelai serta dampak subsidi pupuk terhadap daya saing komoditas tanaman pangan padi, jagung dan kedelai.

Hasil penelitian menunjukkan kebijakan subsidi pupuk yang secara terbuka selama ini berdampak positif, terbukti dapat mengurangi biaya produksi usaha tani jagung dan kedelai serta mampu meningkatkan keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif padi dan jagung namun tidak pada kedelai. Agar subsidi pupuk mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan menciptakan daya saing komoditas tanaman pangan pada padi, jagung dan kedelai. Diharapkan pemerintah mampu memperbaiki tata kelola pemberian subsidi pupuk karena dapat terlihat bahwa dampak pemberian subsidi pupuk selama ini belum dapat dirasakan sepenuhnya oleh petani padi, jagung dan kedelai. Khusus untuk kedelai berdasarkan penelitian tidak membutuhkan banyak pupuk, sedangkan untuk padi sistem distribusi pupuk yang selama terbuka perlu dibuat menjadi tertutup sebab selama ini petani padi sering membeli pupuk dengan harga pasar.

Pengaruh DAU, DBH dan Derajat Desentralisasi terhadap Ruang Fiskal Pemerintah Kabupaten Daerah Tertinggal

Slamet Widodo, SE, ME dan Rastri Paramita, SE, MM

Ringkasan

Kebijakan pengendalian transfer ke daerah menjadi salah satu bentuk upaya pemerintah pusat dalam mendorong efektifitas dana pusat (APBN) yang telah ditransfer kepada daerah sejak diberlakukannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di tahun 2000-an. Kebijakan ini berlaku umum, termasuk untuk kabupaten daerah tertinggal yang saat ini berjumlah 112 kabupaten. DAU merupakan komponen terbesar dalam struktur pendapatan daerah tertinggal, sementara DBH yang diperoleh tidak terlalu signifikan jumlahnya mengingat karakteristik daerah tertinggal yang cenderung minim sumberdaya alam.

Untuk bangkit dari ketertinggalannya, selain mengandalkan pada kebijakan afirmatif bagi daerah tertinggal, daerah tertinggal juga bersandar pada besaran ruang fiskal yang tersedia untuk mendanai kegiatan-kegiatan tertentu yang menjadi prioritasnya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Derajat Desentralisasi terhadap ruang fiskal di 112 kabupaten daerah tertinggal. Data yang digunakan adalah data DAU, DBH dan data APBD periode 2012-2016 yang bersumber dari BPS, Kementerian Keuangan, dan instansi terkait lainnya. Alat analisis menggunakan regresi Data Panel dengan *Fixed Effect Model*. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa seluruh variabel secara signifikan berpengaruh positif terhadap ruang fiskal.

Pengaruh Anggaran Pendidikan terhadap Pembangunan Pendidikan Indonesia

Ratna Christianingrum

Ringkasan

Aset utama dalam proses membangun suatu bangsa adalah sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Sehingga peningkatan kualitas SDM merupakan tumpuan utama peningkatan kualitas suatu bangsa. Mengingat pentingnya Pendidikan dalam membangun suatu bangsa, maka pembangunan SDM melalui pendidikan menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional. Hal ini dibuktikan dengan adanya amandemen UUD 1945 khususnya pasal 31.

Selama hampir satu dekade ini pemerintah telah melaksanakan amanah dari UUD 1945 hasil amandemen, khususnya mengenai pembangunan pendidikan nasional. Sehingga sudah saatnya untuk melakukan evaluasi terhadap pemberian alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total belanja dalam APBN. Apakah alokasi anggaran pendidikan telah memberikan perubahan yang signifikan terhadap pembangunan pendidikan nasional?

Pengalokasian anggaran pendidikan minimal sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) memberikan pengaruh terhadap pembangunan pendidikan di Indonesia, khususnya penyediaan dan pemerataan akses pendidikan yang berkualitas. Namun pembangunan ini belum diikuti dengan peningkatan layanan pendidikan yang berkualitas. Sebagian dari anggaran pendidikan dialokasikan untuk DAK fisik, yang digunakan untuk membangun sarana dan prasarana. Namun jumlah DAK Fisik yang tidak pernah lebih dari 5 persen bahkan terdapat kecenderungan mengalami penurunan (secara persentase) menyebabkan pembangunan fisik lebih difokuskan pada pembangunan ruang kelas. Sedangkan fasilitas pendukung lainnya seperti UKS dan perpustakaan belum menjadi prioritas dalam pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.

Alokasi anggaran pendidikan yang besar tidak diikuti dengan peningkatan kualitas pendidikan. Penurunan angka mengulang tidak diikuti dengan peningkatan angka kelulusan. Peningkatan guru berwenang mengajar lebih dikarenakan adanya penerapan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan guru memenuhi kualifikasi akademis minimal sarjana. Apabila kualifikasi akademis tersebut tidak terpenuhi, maka guru yang bersangkutan tidak bisa naik pangkat dan memperoleh sertifikasi.

Analisis Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial dan Hibah di Tingkat Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018

Dwi Resti Pratiwi dan Marihot Nasution

Ringkasan

Pemilihan umum kepala daerah di Indonesia menjadi salah satu penyebab terjadinya praktik korupsi, *money politics*, dan hubungan patronase yang kuat antara pemilih dan kandidat. Kepala daerah yang berakhir masa jabatannya dan akan maju kembali menjadi calon kepala daerah akan cenderung menggunakan dana kebijakan (*discretionary funds*) untuk meningkatkan popularitasnya agar terpilih kembali. *Discretionary fund* tersebut termasuk alokasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial karena menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, belanja hibah dan bantuan sosial ini masuk dalam kategori belanja tidak langsung yang pengalokasiannya tidak didasarkan pada target kinerja tertentu sehingga penentuan besaran anggarannya cenderung bersifat subjektif.

Pada penelitian ini, penulis menganalisis penggunaan dana bantuan sosial (bansos) dan hibah di tingkat kabupaten kota pada pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2018. Penelitian ini menggunakan analisis statistik uji beda dua variabel berpasangan dan regresi data panel. Analisis uji beda variabel berpasangan digunakan untuk menguji hipotesis 1 yaitu kepala daerah yang menjabat dan 2 periode (2008-2018) akan mengalokasikan proporsi belanja bansos dan hibah yang berbeda saat di akhir periode 1 (menjelang pilkada 2013) dan diakhir periode 2 (menjelang pilkada 2018) dan hipotesis 2 yaitu alokasi proporsi belanja bantuan sosial dan hibah menjelang pilkada 2018 berbeda dengan proporsi tahun sebelumnya. Sementara itu, alat analisis untuk menguji hipotesis 3 dan 4 menggunakan regresi Data Panel dengan *Common Effect Model* dengan estimasi *Ordinary Least Square*. Analisis ini digunakan untuk menguji pengaruh faktor politik dan ruang fiskal terhadap besaran proporsi alokasi belanja hibah dan bansos selama tahun 2014-2017 atau menuju pilkada 2018. Simpulan dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan alokasi dana hibah dan bansos di 46 kabupaten/kota yang kepala daerahnya menjadi *incumbent* di pilkada 2013 dan *non-incumbent* di pilkada 2018, terdapat perbedaan realisasi proporsi dana hibah dan bansos tahun 2016 dibanding tahun 2017 (menjelang pilkada tahun 2018), terdapat pengaruh ruang fiskal terhadap besaran alokasi dana bansos dan hibah, dan besaran alokasi tersebut tidak dipengaruhi faktor politik yang ditandai dengan status *incumbent* dan *non-incumbent* kepala daerahnya.

Halaman ini sengaja dikosongkan